

## KEARIFAN LOKAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERKELANJUTAN DI KOTA BITUNG

### *LOCAL WISDOM COMMUNITY EMPOWERMENT IN SUSTAINABLE FISHERY RESOURCES MANAGEMENT AND DEVELOPMENT IN BITUNG CITY*

**Stendy K. Lakoy**<sup>(1)</sup>, **Shirley Y.V.I. Goni**<sup>(2)</sup>, **Deysi Tampongangoy**<sup>(2)</sup>

1) Staf dan Peneliti pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara/ASN

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada PS Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado

\*Penulis untuk korespondensi: [stendylakoy@gmail.com](mailto:stendylakoy@gmail.com)

---

Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah <a href="mailto:agrisosioekonomi@unsrat.ac.id">agrisosioekonomi@unsrat.ac.id</a>	:	Jumat, 2 Juli 2021
Disetujui diterbitkan	:	Rabu, 28 Juli 2021

---

#### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze local wisdom of community empowerment in the management and development of sustainable fisheries resources in Bitung City. This research is a descriptive observational research, with a phenomenological qualitative approach. Respondents in this research were 10 people who were taken by purposive sampling technique with the focus of research using Jim Ife's theory of local wisdom which consists of local knowledge, local values, local skills and local resources. Data was collected by means of observation, interviews and documentation. Data analysis uses steps consisting of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that local wisdom from Bitung City is the charm festival of the Lembeh Strait and Mangrove planting. For the empowerment of local wisdom, indigenous peoples are empowered by conducting training and business capital assistance. Management and empowerment of local communities is carried out by implementing a community-based resource management approach model, thus in developing community-based resource management, namely by creating a self-help community problem solving system and stimulating citizen participation in community affairs in order to achieve the desired goals through the implementation of empowerment, especially in the fisheries sector. sustainable.*

*Keywords : local wisdom; empowerment; sustainable fishery*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kearifan lokal pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sumberdaya perikanan berkelanjutan di Kota Bitung. Penelitian ini merupakan penelitian observatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Responden dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang diambil dengan teknik *purposive sampling* dengan fokus penelitian menggunakan teori Jim Ife tentang kearifan lokal yang terdiri dari pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal dan sumberdaya lokal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan langkah – langkah yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal dari Kota Bitung yaitu festival pesona Selat Lembeh dan penanaman Mangrove. Untuk pemberdayaan kearifan lokal tersebut, masyarakat adat diberdayakan dengan dilakukannya pelatihan serta bantuan modal usaha. Pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat lokal dilakukan dengan dijalankannya model pendekatan pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat dengan demikian dalam membangun pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat yaitu dengan menciptakan sistem penyelesaian masalah masyarakat swadaya dan merangsang minat partisipasi warga dalam urusan masyarakat guna mencapai tujuan yang diinginkan melalui pelaksanaan pemberdayaan terutama pada sektor perikanan yang berkelanjutan.

Kata kunci: kearifan lokal; pemberdayaan; perikanan berkelanjutan

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki luas perairan laut mencapai 5,8 juta Km<sup>2</sup> atau 75% dari total wilayah Indonesia yang terdiri dari 0,3 juta Km<sup>2</sup> perairan laut teritorial; 2,8 juta Km<sup>2</sup> perairan laut nusantara; 2,7 juta Km<sup>2</sup> laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dengan wilayah laut seluas itu terdapat sekitar 17.504 pulau dirangkai oleh garis pantai sepanjang 95.181 Km yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi negara dengan potensi produksi lestari perikanan terbesar di dunia, sekitar 65 juta ton/tahun dimana sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor andalan dalam menggerakkan perekonomian nasional secara berkelanjutan. (Kelautan dan Perikanan dalam Angka, 2011).

Kondisi laut di Indonesia secara keseluruhan mengalami kondisi *over exploitation* dan *under exploitation*. *Over exploitation* merupakan pemanfaatan laut secara berlebihan tetapi tidak diimbangi oleh pembudidayaan atau regenerasi. *Over exploitation* banyak dialami oleh laut Indonesia bagian barat, seperti Laut Jawa, Laut Sumatera, Laut Sulawesi sedangkan untuk laut Indonesia bagian timur seperti Laut Papua justru mengalami *under exploitation*. Hal tersebut dikarenakan penduduk di wilayah timur lebih sedikit dibandingkan penduduk di wilayah barat Indonesia. Akibatnya tidak sedikit masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan laut, kelengahan ini diamnfaatkan oleh pihak asing untuk mengeruk kekayaan laut Indonesia. Oleh sebab itu seluruh pemerintah daerah untuk terus memperhatikan keberlanjutan sumber daya terutama pada sektor perikanan.

Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sejalan dengan otonomi daerah, dengan menguatnya demokratisasi dan peningkatan peran serta masyarakat membawa konsekuensi pada kabupaten atau kota sebagai basis penyelenggaraan otonomi daerah yang dituntut untuk lebih mampu menjalankan roda pemerintahan secara mandiri. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu menggali potensi lokal, di samping itu pemerintah daerah juga harus mampu mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam proses pengembangan laut. Pengembangan ini hendaknya disusun melalui pendekatan integralistik, sinergik dan harmonis dengan memperhatikan sistem nilai dan kelembagaan yang ada dan berkembang dalam masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sumber daya.

Dengan potensi laut yang begitu besar, dibutuhkan pengelolaan dan pengembangan yang tepat agar kelestarian sumber daya tetap terjaga. Undang – undang No 31 Tahun 2004 Pasal 6 tentang perikanan menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat di dukung menjadi dasar konstitusi bagi pengelolaan berbasis kearifan lokal. Pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan, menempatkan laut sebagai apa yang dipahami masyarakat tradisional sebagai *way of life* yang mewadai seluruh tata sosial kemasyarakatan dan moral masyarakat, bukan hanya ruang untuk mencari nafkah, termasuk di dalamnya pengetahuan tradisional. Sistem pengetahuan tradisional berevolusi dan membentuk kebiasaan masyarakat dalam menjaga sumber daya alam. Dalam proses pengelolaan dan pembangunan sumber daya membutuhkan peranan dari masyarakat terutama masyarakat lokal. Peran masyarakat lokal/ adat dalam pengelolaan dan pembangunan sumberdaya alam yang lestari menjadi sangat penting dikarenakan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam sangatlah tinggi. Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya yaitu dengan menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam dengan memperhatikan adat dan budaya atau kearifan lokal masyarakat sekitar diantaranya kearifan lokal dalam pengelolaan dan pembangunan di sektor perikanan.

Kearifan lokal dalam pengelolaan dan pembangunan sumber daya perikanan pada hakekatnya merupakan suatu proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan agar pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek tetapi sebagai pelaku yang menentukan hidup mereka. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia ini menjadi landasan wawasan pengelolaan sumberdaya lokal yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial

dan strategi perumusan program sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat mengaktualisasikan dirinya dalam mengelola kawasan pesisir yang berbasis masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus berupaya secara optimal untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Hal tersebut dalam rangka menyeimbangkan kondisi laut yang ada.

Kota Bitung yang berada di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki jalur strategik dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan. Bitung dikenal sebagai “Kota Bahari”, aktivitas perekonomian banyak dipengaruhi oleh kegiatan yang berhubungan dengan wilayah laut dan pesisir. Terdapat pelabuhan Internasional Bitung menjadikan Kota Bitung berpeluang besar menjadi pintu gerbang Indonesia untuk kawasan Asia Pasifik (Restra PPS Bitung, 2015). Oleh sebab itu, sektor perikanan dan industri pengelolaan perikanan menjadi basis dan menunjang aktivitas pembangunan dalam sub sektor perikanan di Provinsi Sulawesi Utara. Sumber daya perikanan yang begitu besar, tentunya Kota Bitung harus mengelola dengan baik demi mempertahankan ataupun meningkatkan kualitas dan kuantitas. Kota Bitung sebagai kota otonomi di Sulawesi Utara, menghadirkan peranan besar pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengarahkan kebijakan – kebijakan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia yang dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam mengeksplor potensi daerah secara optimal demi membiayai kegiatan pembangunan daerah.

Kekayaan sumber daya alam terutama pada sektor perikanan di Kota Bitung menjadi daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan dan berbagai instansi meregulasi pemanfaatannya. Dalam pengelolaan sumberdaya tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah menetapkan suatu regulasi dan masyarakat menjalani aturan yang ada. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir menjadi bagian penting dalam melanjutkan ekosistem pesisir terutama dibidang perikanan. Hal tersebut dikarenakan komponen terbesar masyarakat yang tinggal dipesisir merupakan nelayan yang memiliki ketergantungan yang besar terhadap sumber daya perikanan.

Sebagian besar penduduk Kota Bitung berasal dari suku Minahasa dan suku Sangihe selain itu terdapat juga pendatang – pendatang yang berasal dari suku Jawa, Gorontalo, Minangkabau dan Suku Aceh. Namun secara keseluruhan. Dengan begitu banyak suku yang ada di Kota Bitung, secara otomatis kebudayaan lokal menjadi lebih banyak terlebih didukung dengan keberadaan Kota Bitung sebagai kota otonomi. Keberadaan otonomi daerah dan kearifan lokal, pelaku usaha terutama pada sektor perikanan harus mampu beradaptasi menghadapi kearifan lokal yang terus berkembang. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang semakin bertambah.

Akibat jumlah penduduk di wilayah pesisir Kota Bitung yang besar serta kurangnya pengawasan dalam pemanfaatan kawasan pesisir menyebabkan keberlanjutan sumber daya terutama perikanan semakin terancam yang ditandai dengan hasil penangkapan ikan yang semakin menurun. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengolahan ikan di unit – unit pengolahan ikan di Kota Bitung terkadang harus mengambil ikan dari daerah lain seperti ternate (Maluku Utara) atau daerah lainnya untuk diolah. Kemudian jumlah ekspor ikan terutama ikan tuna yang setiap tahunnya jumlah permintaan semakin meningkat terutama dari negara Jepang dan Singapura serta negara – negara di Eropa. Selanjutnya proses *over fishing* atau penangkapan ikan secara berlebih menjadi permasalahan dalam pengelolaan dan pembangunan sumberdaya perikanan di Kota Bitung. Hal ini menyebabkan banyak ikan yang dibuang tanpa dikelola yang disebabkan oleh ketidaktersediaan unit pengolahan ikan yang ditangkap dan masyarakat tidak tahu cara mengelola ikan yang diperoleh serta ketidaktahuan dalam menyalurkan ikan yang diperoleh kemasyarakat luas.

Pemerintah bertanggungjawab menetapkan pengelolaan dan pembangunan sumber daya alam terutama sektor perikanan bagi kepentingan seluruh masyarakat dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya tersebut. Oleh sebab itu untuk menjaga keberlanjutan sektor perikanan, perlu dilakukan pemberdayaan terhadap masyarakat agar dapat mengelola sektor perikanan bersama – sama dengan pemerintah agar keberlanjutan perikanan dapat terwujud dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada.

Persepsi masyarakat lokal yang menjalankan budaya atau kearifan lokal tentang pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan didapatkan untuk mengetahui pentingnya kelestarian sumberdaya perikanan dalam menopang kehidupan. Oleh sebab itu kajian mengenai pemberdayaan masyarakat dalam mengelolah dan mengembangkan sumberdaya perikanan mutlak untuk dilakukan oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan dan pembangunan sumber daya perikanan dari sudut pandang kearifan lokal dengan judul “Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.”

#### **Rumusan Masalah**

Bagaimana kearifan lokal pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sumberdaya perikanan berkelanjutan di Kota Bitung?

#### **Tujuan Penelitian**

Menganalisa kearifan lokal pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sumberdaya perikanan berkelanjutan di Kota Bitung.

#### **Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang manajemen sumber daya khususnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kota Bitung dalam pengambilan keputusan guna pengelolaan dan pembangunan sumberdaya perikanan berkelanjutan.
- b. Bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan dilihat dari kearifan lokal pemberdayaan masyarakat dalam mendukung potensi sumberdaya perikanan.

Nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dapat dipahami sebagai gagasan daerah setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik

yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Oleh sebab itu nilai kearifan lokal sangat memiliki peran penting bagi masyarakat dimanapun masyarakat itu berada. Masyarakat di Kota Bitung yang kebanyakan hidup dipesisir, menggantungkan kehidupannya dari sumber daya yang tersedia di sekitar termasuk sumber daya dari perikanan. Untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka sampai pada ke generasi selanjutnya, maka pemberdayaan perlu untuk dilakukan agar dapat menjaga, mengelola dan membangun sumber daya terutama untuk sektor perikanan berkelanjutan.

Dalam menjaga nilai kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat, masyarakat perlu untuk memahami dan mengetahui tentang manusia dalam hubungan antar sesama, alam dan seluruh komunitas dalam bentuk pengetahuan lokal. Nilai lokal merupakan tradisi dan budaya pada masyarakat yang dapat mengelola dan diberdayakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Masyarakat juga harus memiliki keterampilan lokal, yaitu keterampilan dalam mengelola sebagai komposisi yang bersentuhan langsung dengan sektor perikanan. Kemudian ketersediaan sumber daya lokal dimana proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat harus didasarkan ppada pemanfaatan sumber daya.

Oleh karena itu, kearifan lokal pemberdayaan masyarakat dalam pengelolan dan pembangunan sumber daya perikanan berkelanjutan khususnya di Kota Bitung perlu untuk memperhatikan kearifan lokal masyarakat di Kota Bitung yaitu apa saja yang menjadi kearifan lokal masyarakat setempat. Melalui kearifan lokal yang dimiliki, perlu dilakukannya pemberdayaan kearifan lokal menggunakan model pengelolaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal untuk membangun pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian observatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan menggunakan metode kualitatif fenomena (*kualitatif-phenomenologis*) yang

bertujuan untuk memberikan gambaran suatu fenomena atau kenyataan sosial secara jelas yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengidentifikasi potensi perikanan dalam penelitian ini tentang pengelolaan sumberdaya perikanan ikan tuna. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Sulistyo-Basuki, 2006)

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang dimulai dari proses penyusunan proposal, proses pembimbingan dan penyajian dalam bentuk tesis. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pihak yang berkaitan dengan unit pengolahan ikan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengambilan sampel, diperoleh menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik *sampling* non random dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

### **Informan Penelitian**

Peneliti menentukan informan penelitian dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, terdiri dari:

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung (1 orang); pemerintah Kota Bitung sebagai institusi formal yang memiliki kaitan erat dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya terutama sumber daya perikanan di Kota Bitung.
2. Kepala Bagian Pembangunan SetDa Kota Bitung (1 orang); institusi formal pemerintah yang memahami tentang pengelolaan dan pembangunan di bidang perikanan.
3. Unit Pengolahan Ikan (2 orang); instansi non formal yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan sektor

perikanan dalam hal pengelolaan dan pembangunan sumber daya perikanan.

4. Masyarakat/ Tokoh Masyarakat (Tua Adat/Pemangku Adat) (2 orang); merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari instansi non formal yang dipandang memahami permasalahan ritual kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembangunan sumber daya perikanan yang tinggal dan menetap di pesisir laut (Selat Lembeh).
5. Nelayan (4 orang); masyarakat yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dan pembangunan perikanan dimana masyarakat dalam hal ini nelayan yang berinteraksi langsung dengan sektor perikanan yang mempengaruhi keberlanjutan perikanan yang ada.

### **Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada dimensi kearifan lokal menurut Jim Ife (2002) yang terdiri dari:

1. Pengetahuan Lokal; bentuk kearifan lokal masyarakat di Kota Bitung yang menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manusia dan hubungan antar sesama, alam dan seluruh anggota komunitas ekologis pemberdayaan masyarakat.
2. Nilai lokal; tradisi dan budaya pada masyarakat di Kota Bitung yang dapat dikelola dan diberdayakan agar dapat mengatur kehidupan masyarakat sebagai suatu aturan dalam suatu lingkungan dalam hal pengelolaan sumberdaya perikanan yang lestari dan berkelanjutan.
3. Keterampilan lokal; pengelolaan dan pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat adat/lokal sebagai komposisi yang bersentuhan langsung dengan sektor perikanan sebagai bentuk kearifan lokal.
4. Sumberdaya lokal; proses pembangunan pengelolaan sumberdaya yang berbasis masyarakat yang didasarkan pada pemanfaatan sumberdaya perikanan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti rekaman video/audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk lebih jelas dalam setiap langkahnya, akan kita bahas bersama di bawah ini. Langkah-langkah tersebut terdiri dari: reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Daerah Penelitian**

Kondisi umum perikanan dan kelautan Kota Bitung memiliki potensi perikanan dan kelautan yaitu menjadi salah satu bagian kondisi luas perairan lestari sumberdaya perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang didukung dengan posisi dan potensi strategis sebagai bagan negara kepulauan dengan luas mencapai  $\frac{3}{4}$  dari total wilayah dengan kekayaan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, oleh sebab itu sektor perikanan dan kelautan tercantum dalam Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, dimana salah satu misinya mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Proses pengelolaan dan pembangunan sumberdaya alam khususnya perikanan tidak terlepas dengan pengelolaan pesiri dan pulau – pulau yang tercantum dalam Undang – undang No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah

perisair dan pulau – pulau kedcil. Dalam pengelolaannya menyebutkan bahwa hak pengusahaan perairan pesisir dapat diberikan diantaranya kepada masyarakat adat/lokal.

Dengan demikian pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi hak – hak masyarakat adat, masyarakat tradisional dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun. Pengakuan hak – hak masyarakat adat, masyarakat tradisional dan kearifan lokal dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah secara berkelanjutan.

Kearifan lokal merupakan bagian konsepsi hukum adat tentang hak – hak atas tanah dan air. Hukum adat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik, religus yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, bersifat pribadi akan tetapi mengandung unsur kebersamaan. Bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dan laut, sumberdaya laut tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan ekonomi dan kehidupan sehari –hari masyarakat, tetapi mereka sangat mengenal lingkungan sekitar mereka dan tahu bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup secara harmonis dan tetap dapat mempertahankan keberlanjutan dan kestabilan wilayah laut dan pesisir beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Hak dan kwewajiban yang dimiliki oleh masyarakat adat di dalam mengelola sektor laut dalam hal ini perikanan memiliki kekuatan eksternal yang memberikan potensi besar bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, sebagai bentuk menopang kearifan lokal masyarakat terutama masyarakat nelayan dalam menjaga sektor perikanan agar dapat berlanjut terus menerus dan dapat diwariskan ke generasi selanjutnya maka proses pembedayaan terhadap masyarakat perlu untuk dilakukan.

### **Hasil Wawancara**

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bitung pada tanggal 10 Mei 2021 mengatakan bahwa:

*“Berkaitan dengan kearifann lokal di daerah kabupaten/kota, keberadaan masyarakat adat seyogyanya dapat dibuktikan melalui serangkaian cerita sejarah yang sudah berlangsung dalam komunitas masyarakat*

*adat tersebut dimana keberadaan tersebut tidak hanya diakui oleh komunitas adat itu sendiri tetapi masyarakat lain yang ada disekitarnya yang sudah berlangsung dalam jangka waktu tertentu.”*

Upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berbasis kearifan lokal berlaku mulai dari pengelolaan sumberdaya air, hutan, ikan baik di perairan darat maupun pesisir laut bahkan dalam sistem usaha. Upaya – upaya yang dilakukan untuk pengelolaan perikanan berkaitan dengan fungsi – fungsi biologi, sosial, teknologi, ekonomi serta lingkungan sumber daya sebagai komponen yang saling berhubungan untuk terjaminnya pengelolaan perikanan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberdayakan masyarakat terutama nelayan dengan mempersiapkan, mengkaji, merencanakan program serta pelaksanaan program dan evaluasi dilakukan untuk keberlanjutan sektor perikanan dengan memperhatikan kearifan lokal yang terdapat di wilayah. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan perikanan berkelanjutan harus berbasis masyarakat.

Wawancara yang dilakukan dengan salah satu pimpinan Unit Pengolahan Ikan di Kota Bitung, RT, tentang kearifan lokal dan pengelolaan dan pembangunan perikanan berkelanjutan pada tanggal 11 Mei 2021 mengatakan bahwa :

*“Sudah pernah ada upaya yang sudah dicoba di wilayah pesisir di Indonesia dan negara – negara di Asia lainnya yang diharapkan mampu mengatasi kerusakan dan berkurangnya sumber daya yaitu dengan merubah pola pikir tentang pemanfaatan sumberdaya ikan dari akses terbuka menjadi kepemilikan umum dengan melibatkan masyarakat, pola ini dikenal dalam bentuk community-based Coastal Resources Management (CB-CRM) atau pengelolaan sumber daya pesisir yang berbasis masyarakat yaitu proses dimana masyarakat melalui proses politik menyepakati atau menyetujui untuk mengelola sumber daya ikan atau mengalokasikan sebagian sumber daya yang ada di masyarakat harus diolah tetapi harus juga dikembangkan untuk keberlanjutannya.”*

#### **Responden MP**

Sekretariat Daerah Kota Bitung, MP yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kota Bitung, mengatakan bahwa :

*“Saya sudah berumur 43 Tahun. Saya lahir dan besar di Kota Bitung. Sebelumnya saya menjabat sebagai Camat di Selat Lembeh. Jadi untuk sejarah Festival Pesona Selat Lembeh ini, kurang lebih saya pahami. Sebelum disebut sebagai Festival Pesona Selat Lembeh, dulunya bernama Festival Selat Lembeh tanpa kata pesona. Namun sebelumnya ini bernama Festival Nelayan. Dikarenakan kebiasaan dari masyarakat khususnya para nelayan yang setelah menangkap ikan, mereka mengucap syukur bersama – sama dengan para pengusaha ikan atas hasil laut dalam hal ini ikan yang diberikan oleh Tuhan. Ini dilihat oleh pemerintah Kota Bitung sebagai suatu budaya (kearifan lokal) yang perlu untuk dikembangkan, maka terciptalah Festival Pesona selat Lembeh ini. Festival ini sudah dilakukan sejak tahun 2009 dan menjadi hajatan ahunan yang diselenggarakan oleh komunitas nelayan dan pengusaha perikanan Kota Bitung bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bitung.”*

#### **Responden KG, BK dan UT**

Hasil wawancara dengan KG, BK dan UT, para nelayan yang lahir dan menetap di wilayah Selat Lembeh Kota Bitung, senada dengan Kabag Pembangunan MP, yang diwawancarai pada tanggal 14 Mei 2021, mengatakan bahwa :

*“Festival Selat Lembeh ini merupakan bentuk rasa syukur kami bersama dengan para bos – bos (pengusaha ikan) kepada Tuhan yang telah memberikan hasil laut yaitu ikan yang begitu banyak, melimpah.”*

#### **Responden RK**

Responden RK yang diwawancarai ditempat terpisah pada tanggal 14 Mei 2021 yang mengatakan bahwa :

*“Festival ini baru sekarang di angkat ke dunia luar. Sebelumnya kami para nelayan sudah sering melaksanakan dari tahun – tahun jauh (sudah lama) tapi karena terlihat begitu baik untuk menjadi ikon wisata, maka nelayan dan para pengusaha bersama –sama dengan pemerintah membuat festival yang menjadi daya tarik yang dapat dikatakan bahwa kami mengundang sebagai suatu bentuk kunjungan wisata untuk bersyukur bersama-sama atas berkat laut (ikan) yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.”*

## Pembahasan

Dalam Undang – undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalamnya mengamanatkan pola perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat sehingga diharapkan proses dan hasil pembangunan yang sudah dihasilkan dapat dinikmati oleh masyarakat. Pengolahan perikanan mengadopsi serta mengedepankan konservasi dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Oleh karena masyarakat perlu untuk diberdayakan dengan mengedepankan kearifan lokal dalam prosenya untuk mengelola dan membangfun sumber daya perikanan berkelanjutan.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan berbasis kearifan lokal di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara yaitu teori yang disampaikan oleh Jim Ife. Menurut Jim Ife terdapat 4 dimensi yang mempengaruhi kearifan lokal dalam proses pemberdayaan masyarakat, dimana dimensi – dimensi tersebut terdiri dari pengetahuan lokal, nilai lokal; keterampilan lokal dan sumberdaya lokal.

### 1. Kearifan Lokal Masyarakat Kota Bitung

Bentuk kearifan lokal dalam masyarakat bisa berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan. Kelangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Kearifan lokal yang terjadi di Kota Bitung tidak hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman tentang relasi tetapi menyangkut juga dengan kebiasaan kelompok manusia dengan seluruh penghuni ekologi pemberdayaan masyarakat tentang pengelolaan dan pembangunan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan yang dilakukan secara sadar.

Masyarakat tradisional di Kota Bitung pada umumnya sangat mengenal dengan baik lingkungan disekitarnya. Mereka hidup dalam berbagai ekosistem alami yang ada dan telah lama hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, sehingga mengenal berbagai cara memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Masyarakat Kota Bitung khususnya di pesisir dan laut memiliki keunikan khusus seperti kesederhanaan, ikatan emosional tinggi, kesenian rakyat dan loyalitas pada pimpinan kultural seperti halnya konsep-konsep yang berkembang di daerah sebagai seluk beluk masyarakat. Kearifan lokal tersebut menjadi pedoman dalam berperilaku. Dalam berperilaku orang akan berpedoman pada berbagai macam hal yang pada hakekatnya mempunyai nilai baik dan buruk serta pada kegiatan yang didasarkan pada benar dan salah. Dalam kearifan lokal juga terwujud upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang juga merupakan wujud dari konservasi oleh masyarakat. Kearifan lokal di Kota Bitung yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola dan membangun sumberdaya perikanan berkelanjutan yang diangkat dalam penelitian ini terdiri dari :

#### a. Festival Nelayan (Festival Selat Lembeh)

Festival Pesona Selat Lembeh pertama kali dilaksanakan pada tahun 2009 yang sebelumnya bernama Festival Selat Lembeh. Festival ini pertama kali dikenal dengan nama festival Nelayan. Dimana para nelayan dan pengusaha perikan melaksanakan festival nelayan sebagai bentuk syukur mereka terhadap berkat Tuhan akan hasil laut yang mereka peroleh. Selanjutnya terus dilaksanakan setiap tahunnya yang digelar tiap bulan Oktober sebagai program tahunan pemerintah Kota Bitung dan menjadi warisan budaya dan sebagai kearifan lokal yang diwariskan secara terus menerus atau turun temurun. Bahkan festival ini menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan *World Ocean Conference (WOC)*, yang mengangkat pentingnya kelestarian laut dan konservasinya.

#### b. Penanaman Mangrove di Pasir Panjang

Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar, baik ditinjau secara fisik, kimia, biologi, ekonomi, bahkan wahana wisata. Secara fisik hutan mangrove

dapat menjaga garis pantai agar tidak terjadi abrasi, menahan sedimen, tiupan angin, dan menyangga rembesan air laut ke darat. Secara kimia hutan mangrove mampu mengolah limbah agar kemungkinan pencemaran sedikit dan yang paling utama menghasilkan oksigen. Secara biologi hutan mangrove merupakan habitat biota darat dan laut, sebagai daerah asuhan, mencari makan, dan tempat menghasilkan bibit ikan, batangnya dapat dijadikan bahan bakar, bahkan dapat dijadikan suplemen. Dan sebagai fungsi wahan wisata, hutan mangrove dijadikan sebagai tempat penelitian dan tempat wisata.

Hutan mangrove dapat menjadi solusi untuk berbagai jenis masalah lingkungan yang sering terjadi di bumi, terlebih semenjak krisis iklim dan berbagai macam pencemaran lingkungan menjadi semakin marak di bumi tercinta, termasuk di Indonesia. Kerusakan lingkungan ini bukan hanya berdampak negatif pada manusia, melainkan juga untuk hewan-hewan, khususnya hewan yang hidup di habitat air. Salah satu manfaat hutan mangrove untuk hewan adalah manfaat hutan mangrove untuk ikan laut. Manfaat hutan laut untuk ikan laut adalah sebagai tempat perlindungan bagi spesies-spesies ikan yang ada di laut. Beberapa jenis hewan laut seperti ikan, udang, kepiting, kura-kural, dan siput memiliki sifat yang membuatnya hanya cocok untuk tinggal di air payau. Dengan adanya hutan mangrove, tentu saja hal ini dapat menjadi sebuah habitat bagi spesies-spesies ikan, udang, kepiting, kura-kura, siput, dan ikan laut lainnya.

Dengan menjaga kelestarian hutan mangrove, habitat ikan laut akan menjadi lebih terjaga sehingga ikan laut dan aneka spesies lainnya dapat berkembang biak secara optimal di hutan mangrove. Apabila hal ini dapat berjalan dengan baik, pada akhirnya hutan mangrove secara tidak langsung juga dapat memberikan manfaat yang besar bagi manusia dari keberhasilan konservasi terhadap ikan laut melalui hutan mangrove. Melalui kondisi hutan mangrove yang baik, aneka jenis ikan laut akan dapat berkembang biak secara optimal sehingga hal ini akan mendatangkan manfaat secara ekonomi, terlebih bagi para nelayan dan penduduk di sekitar mangrove yang bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan konsumsi atau kebutuhan lainnya seperti perdagangan, dengan penggunaan yang bertanggungjawab.

## 2. Pemberdayaan Kearifan Lokal

Proses pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat lokal tidak lepas dari proses pemandirian masyarakat dalam mengelola dan membangun dalam hal ini sektor perikanan berkelanjutan. Dengan memberikan pelatihan khusus mengakomodasikan usulan anggota masyarakat jika ada yang meminta pelatihan tertentu di luar program pemberdayaan yang telah disusun. Sebagai contoh, dalam kekriyaan pemuda karang taruna, dari pihak partisipan ada yang mengusulkan untuk diberi pelatihan pembuatan perahu. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat mampu menganalisis hal-hal yang dibutuhkan.

Mengangkat kearifan lokal perlu memanfaatkan kearifan-kearifan lokal dalam upaya pemberdayaan komunitas. Contoh, mengajarkan masyarakat membuat dan mengelola tambak ikan bagi masyarakat suku laut di perairan yang memiliki kearifan lokal berupa larangan mengambil hasil laut secara berlebihan atau membuat penangkaran telur ikan di kawaang mangrove pasirpanjang di Kota Bitung. Selanjutnya dengan memberikan bantuan sarana sarana termasuk unsur yang paling penting dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Walaupun tujuan dari program pemberdayaan yaitu agar masyarakat mampu mandiri, namun sebagai proses awal memperkuat kemampuan masyarakat, diperlukan pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana. Contoh, untuk mencapai kesuksesan dari program pengelolaan dan pembangunan sumberdaya perikanan berkelanjutan diperlukan bantuan berupa alat-alat perikanan serta bantuan perizinan menggunakan bangunan dan fasilitas umum. Dalam praktiknya, sederet strategi-strategi pemberdayaan komunitas tersebut dilaksanakan secara bertahap.

## 3. Model Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Kearifan lokal sejatinya yang memiliki enam dimensi yang meliputi pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya alam lokal, mekanisme pengambilan keputusan lokal, serta solidaritas kelompok lokal pada dasarnya menjadi panduan dalam proses pemberdayaan. Pemberdayaan kearifan lokal intinya menjadi prospek kearifan lokal dimasa akan datang (masa depan).

Pemerintah Kota Bitung yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam khususnya dalam perikanan dan masyarakat, dimana masyarakat setempat tinggal dan kemauan masyarakat untuk tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Maka dari itu penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam melakukan tindakan di lingkungan dimana mereka tinggal guna menghindari konflik-konflik sosial dimana pengelolaan sumberdaya dalam hal ini pengelolaan sumberdaya perikanan yang kurang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat lokal akan dapat menimbulkan konflik terutama dalam pengelolaan, alternatif pengelolaan lahan, dan pemetaan sumberdaya alam serta kepentingan antar kelompok masyarakat lokal.

Melihat pentingnya peran masyarakat lokal dalam menjaga keberlanjutan perikanan maka penting untuk mempertahankan dan melindungi tindakan-tindakan masyarakat yang merupakan bentuk dari kearifan lokal. CBNRM (*Community based nature resource management*) atau Pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat merupakan strategi pengelolaan Sumberdaya perikanan dimana masyarakat berpartisipasi secara aktif dan berperan dalam menanggulangi masalah yang mempengaruhi kondisi perikanan sehingga dalam hal ini CBNRM sangat menaruh perhatian pada partisipasi masyarakat lokal dalam memanfaatkan dan memelihara sektor perikanan di sekitarnya. CBNRM merupakan contoh pendekatan dalam sistem pengelolaan sektor perikanan yang mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, pemerataan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar pesisir secara berkelanjutan.

Peran masyarakat lokal dalam CBNRM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Secara umum peran masyarakat sendiri ditentukan oleh 3 hal yaitu : 1) sejauh mana pengetahuan lokal dapat dihargai dan dimanfaatkan dalam membentuk sebuah sistem pengelolaan kawasan konservasi yang baik; 2) seberapa besar kepedulian warga komunitas lokal terhadap alamnya sehingga mampu mendorong ke arah upaya-upaya untuk

menjaga dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan di dalam maupun di luar kawasan dan 3) seberapa banyak manfaat (material dan nonmaterial) yang bisa diterima masyarakat dari kawasan konservasi sehingga keberadaannya memiliki nilai yang menguntungkan secara terus menerus.

Walaupun belum ada contoh yang berhasil namun konseptual CBNRM bisa menjadi rujukan dalam membangun model pengelolaan kawasan konservasi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian keanekaragaman hayatinya. Beberapa pokok persoalan yang menjadi sasaran utama CBNRM, yaitu : 1) membuka akses bagi masyarakat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup lewat pemanfaatan sumberdaya hayati yang tersedia sehingga mendorong mereka untuk terus mempertahankan keberadaannya; dan 3) penguatan posisi masyarakat dan stakeholder lain dalam proses-proses pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam. Untuk menunjang keberhasilannya maka ada beberapa prinsip dalam penerapan CBNRM, yaitu prinsip pemberdayaan masyarakat, prinsip kesetaraan peran, prinsip berorientasi pada lingkungan dan prinsip penghargaan terhadap pengetahuan lokal/tradisional.

#### 4. Membangun Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat

Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri merupakan pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Jadi, untuk melaksanakan pembangunan disuatu daerah, hendaknya pemerintah mengenal lebih dulu seperti apakah pola pikir dan apa saja yang ada pada daerah yang menjadi sasaran pembangunan tersebut. Adalah sangat membuang tenaga dan biaya jika membuat tempat wisata tanpa memberi pembinaan kepada masyarakat setempat bahwa tempat tersebut adalah "ikon" atau sumber pendapatan yang mampu menyejahterakan rakyat di daerah itu. Atau lebih sederhananya pembangunan akan menjadi sia-sia jika pemerintah tidak mengenal masyarakat atau potensi yang tepat untuk pembangunan di daerah tersebut.

Pembangunan pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat harus melampaui program ekonomi yang direncanakan dan lebih mengutamakan perbaikan serta peningkatan identifikasi masyarakat dengan lokalitas agar mereka terlibat dalam proses pembangunan lokal. Pendekatan pembangunan lokalitas ini menekankan pada keseluruhan kapasitas sistem lokal untuk membangun dan memelihara hubungan kerja sama antar-kelompok. Caranya dengan menciptakan sistem penyelesaian masalah masyarakat swadaya dan merangsang minat partisipasi warga dalam urusan masyarakat. Guna mencapai tujuan yang diinginkan melalui pelaksanaan pemberdayaan, diperlukan strategi yang tepat. Strategi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat untuk pembangunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi masyarakat, selanjutnya fasilitator atau pihak pemberdaya komunitas sepatutnya menghargai segala potensi yang dimiliki oleh komunitas sasaran. Dalam mempertimbangkan potensi masyarakat, perlu melokalisasi kearifan lokal masyarakat tersebut yang akan digunakan sebagai batu loncatan pemberdayaan. Sehingga dengan begitu masyarakat akan lebih mudah menerima berbagai perubahan dalam proses pemberdayaan. Memberikan pendampingan secara berkelompok pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara berkelompok dinilai akan lebih efektif dibandingkan jika harus dilakukan satu per satu. Hal ini berdasarkan pertimbangan efisiensi dan keterbatasan waktu serta biaya yang harus dikeluarkan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang ditujukan untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat maka masyarakat seharusnya memiliki kekuatan besar untuk mengatur dirinya sendiri dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di era otonomi ini. Proses peralihan kewenangan dari pemerintah ke masyarakat harus dapat diwujudkan. Namun ada beberapa hal yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah seperti soal kebijakan fiskal sumberdaya, pembangunan sarana dan prasarana, penyusunan tata ruang pesisir, serta perangkat hukum pengelolaan sumberdaya. Meski hal tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah, namun tidak berarti masyarakat tidak memiliki kontribusi dan partisipasi dalam setiap formulasi kebijakan. Dengan adanya kontribusi

dan partisipasi masyarakat maka kebijakan yang diformulasikan tersebut akan lebih menyentuh persoalan yang sebenarnya dan tidak merugikan kepentingan publik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yang telah dijelaskan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Kearifan lokal Festival Pesona Selat Lembeh yang dilakukan setiap tahunnya pada bulan oktober merupakan kearifan lokal Kota Bitung yang dilaksanakan dalam rangka mensyukuri berkat Tuhan atas hasil laut yang diperoleh. Kearifan lokal Hutan Mangrove disebut sebagai salah satu kearifan lokal dikarenakan dijadikan sebagai budaya bagi masyarakat untuk menanam mangrove yang dikhususkan untuk melestarikan dan menangkarkan ikan – ikan dengan tujuan aga perikanan di Kota Bitung dapa terus berlanjut dan dapat dirasakan oleh generasi berikutnya.
2. Pemberdayaan kearifan lokal menjadi sebuah tradisi dan budaya yang terdapat dalam masyarakat di Kota Bitung yang menjadi suatu peluang untuk dikelola dan diberdayakan sehingga dapat mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat sehari-hari dan menjadi norma sebagai aturan yang berpihak pada lingkungan dalam konteks pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan diantaranya dengan mengajarkan masyarakat untuk mengambil atau menangkap ikan sesuai dengan kebutuhan dengan kata lain agar tidak melakukan over fishing. Sedangkan untuk di kawasan hutan mangrove terus dilakukan penanaman mangrove tanpa membatnya.
3. Keterampilan lokal yaitu model pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat lokal yang menggunakan model CBNRM (*Community based nature resource management*) atau Pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat merupakan strategi pengelolaan Sumberdaya perikanan dimana masyarakat berpartisipasi secara aktif dan berperan dalam menanggulangi masalah yang mempengaruhi kondisi perikanan.

4. Dalam membangun pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat kontribusi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dimana dalam memberdayakan sosial ekonomi masyarakat maka masyarakat harus memiliki kekuatan besar untuk mengatur dirinya sendiri dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.

#### **Saran**

Hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah jelaskan tentang kearifan lokal pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sumberdaya perikanan berkelanjutan di Kota Bitung, peneliti memberi masukan dalam hal ini beberpa saran yang terdiri dari:

1. Pemerintah perlu membuat program perencanaan dan pembangunan untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang ada di Kota Bitung serta mengangkat seluruh kearifan lokal yang ada agar dapat menunjang sektor – sektor lainnya terutama sektor – sektor yang berhubungan dengan sektor perikanan.
2. Pemberdayaan kearifan lokal terutama yang berhubungan dengan sektor perikanan diatur dalam suatu peraturan yang jelas agar pemerintah dapat mengawasi dan masyarakat dalam menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.
3. Perlu dilakukan pendekatan – pendekatan yang lebih spesifik dan intens terhadap untuk memberdayakan masyarakat diantaranya bekerjasama dengan instansi lain dalam hal memberikan pelatihan – pelatihan bahkan bantuan modal usaha yang lebih besar.
4. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat, masyarakat perlu dilibatkan dalam berbagai agenda pemerintah terutama dalam hal kearifan lokal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Basuki, Sulisty. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Jim Ife (2002). *Community Development. Community Based Alternative in a of Globalization*. Australia: Longman is an Imprint of Paperson Education.
- Kelompok Kerja Penyelarasan Data Kelautan dan Perikanan. 2011. *Kelautan dan Perikanan dalam Angka, 2011*. Jakarta: Pusat Data Statistik dan Informasi.